



populi center
PUBLIC OPINION & POLICY RESEARCH

Jl. Letjen S. Parman Kav. 5-6
Kompleks Mandiri Blok O No. 12,
Slipi, Jakarta Barat
Telp. 62-21-22123150;
E-mail: info@populicenter.org
Website: <http://www.opulicenter.org>

NASKAH ORASI

Diskusi Publik |
Indonesia Timur Masa Depan Kita?

Peluncuran Buku |
Ke Timur Haluan Menuju

NASKAH ORASI

Diskusi Publik |

Indonesia Timur Masa Depan Kita?

Peluncuran Buku |

Ke Timur Haluan Menuju

Dalam rangka ulang tahun ke-7 Populi Center, Jakarta
Jakarta Design Center, Jakarta, 20 Juni 2019

Naskah-naskah Orasi ini dicetak hanya untuk kepentingan diskusi pada acara Peluncuran Buku *Ke Timur Haluan Menuju*, dalam rangka Ulang Tahun ke-7 Populi Center di Gedung Jakarta Design Center pada 20 Juni 2019. Naskah-naskah tersebut tidak didistribusikan baik secara komersial maupun non-komersial kepada khalayak di luar peserta diskusi.

Daftar Isi

- Sambutan Direktur Eksekutif Populi Center •5
- Memutar Haluan Perahu Ke Timur • 13
Dr. Daniel Dhakiade
- Membangun Visi Ekonomi Masa Depan •27
Dr. Prasetyantoko
- Maluku Menyongsong
Ke Timur Haluan Menuju •41
Dr. Mus J. Huliselan

SAMBUTAN DIREKTUR EKSEKUTIF POPULI CENTER

Diskusi Publik | Indonesia Timur Masa Depan Kita &
Peluncuran Buku | *Ke Timur Haluan Menuju*

Hadirin yang mulia,
Dalam pertemuan malam ini, kita akan membicarakan sesuatu yang cenderung selalu membuat kita terpaku dan terpekur, ketika harapan dan kecemasan beraduk tentang sesuatu yang terus menjadi misteri, yang kita bayangkan seperti sebuah horizon yang tak tersambangi nun jauh di sana, yakni soal masa depan. Dalam perjamuan ini pula, kita akan mendengarkan secara bersama-sama beberapa orasi dari kaum yang sangat terpelajar yang akan mendiskusikan masa depan Indonesia. Di samping itu, secara bersama-sama pula kita akan menjalani prosesi peluncuran buku yang berjudul *Ke Timur Haluan Menuju*, yang dengan segenap upaya yang melelahkan dan kegembiraan yang timbul tenggelam telah disiapkan oleh tim peneliti Populi Center, Jakarta.

Kita selalu membayangkan masa depan sebagai sesuatu yang secara spasial berada di depan, belum dikenal

tapi selalu mengundang rasa keingintahuan terus-menerus. Riset-riset saintifik sudah memperlihatkan kepada kita bahwa manusia pada umumnya lebih percaya kepada masa lalu daripada masa depan. Mungkin karena kita merasa bahwa masa lalu adalah keping-keping yang menyusun masa kini; ia sudah dialami oleh tubuh kita sendiri atau diriwayatkan oleh individu-individu pendahulu kita.

“persepsi kita tentang linearitas waktu, dan dengan itu juga berarti linearitas sejarah, terbentuk dari proses intervensi tradisi Judeo Kristian atas pemetaan sejarah sekular dengan memasukkan konsep-konsep biblikal ke dalamnya.

Mudah sekali bagi kita untuk melupakan bahwa apa yang kita bayangkan tentang masa depan atau bahkan yang kita masukan ke dalam kotak-kotak keranjang kenangan tentang masa lalu, itu didasarkan pada persepsi temporal kita tentang linearitas waktu. Kita cenderung mempersepsikan masa depan sebagai sesuatu yang seolah-olah padat dan konkret, dan universal, meskipun masih sangat jauh, sehingga cenderung mudah pula melupakan bahwa konsepsi tentang masa depan adalah penemuan yang belum terlalu lama benar.

Persepsi linearitas waktu adalah invensi modernitas.

Seorang peziarah kultural, penyair Meksiko penerima Nobel tahun 1990, Octavio Paz, mengingatkan kita bahwa persepsi kita tentang linearitas waktu, dan dengan itu juga berarti linearitas sejarah, terbentuk dari proses intervensi tradisi Judeo Kristian atas pemetaan sejarah sekular dengan memasukkan konsep-konsep biblikal ke dalamnya. Sejarah kemudian ditafsirkan sebagai sebuah lintasan garis lurus, teleologis, ada awal yang bisa dilacak dan akhir yang sudah (dibikin) pasti; seperti ajaran tentang Penciptaan, keterperosokan ke dalam dosa, penebusan dan sorga sebagai akhir. Hidup senantiasa harus punya *telos*, *the ultimate goal*, tujuan yang paling utama dan paling akhir (surga di seberang kehidupan atau kemakmuran/keuntungan di ujung tindakan-tindakan produksi ekonomis atau kemajuan (*progress*) sebagai hasil dari pembangunan).

Paz mengingatkan kita bahwa setiap peradaban pada dasarnya memiliki sebuah gagasan tentang waktu yang berbeda antara satu dengan lainnya. Untuk masyarakat Abad Pertengahan, misalnya, hal terpenting bagi mereka adalah keabadian, sebuah waktu di luar waktu, dan masa lalu. Mereka tidak percaya pada masa depan. Yang diketahuinya dengan baik adalah bahwa dunia akan segera ditimpa hukuman menuju kepunahan. Maka yang dipersoalkannya adalah bagaimana menyelamatkan jiwa orang-seorang, dan bukan mencoba menyelamatkan dunia.

Selama belasan tahun saya banyak berguru kepada bermacam-macam kelompok etnis dan subetnis kecil di berbagai sudut kepulauan Nusantara (mereka tidak pernah

merekomendasikan siapa yang harus saya pilih sebagai presiden tentu saja). Beberapa di antara mereka memahami kehidupan sebagai lingkaran siklikal, yang cukup sulit dipahami oleh kita yang terbiasa dengan persepsi temporal yang linear. Ada pula yang memandang hidup setelah kematian adalah hidup di alam “di sebelah malam”.

“bukan hanya jiwa individual yang harus dan bisa diselamatkan melainkan seluruh umat manusia. Para pengkhotbah Pencerahan menyerukan ajakan baru untuk ke luar dari nasib buruk.

Modernitas telah memperkenalkan sesuatu yang baru pada konsepsi orang-orang Eropa, kemudian kepada kita juga tentu saja, tentang penyelamatan. Yakni bahwa bukan hanya jiwa individual yang harus dan bisa diselamatkan melainkan seluruh umat manusia. Para pengkhotbah Pencerahan menyerukan ajakan baru untuk ke luar dari nasib buruk. Yang ditawarkannya adalah apa yang oleh Anthony Giddens disebut sebuah “*applicable future*”, hasil dari sebuah proses pemisahan antara ruang dan waktu, sebuah historisitas global yang akan merenggut kehidupan modern dari genggaman tradisi masa lalu.

Hadirin yang mulia,
 Itu adalah jalan panjang dan berliku, dengan kata lain, bertele-tele, saya untuk menyatakan bahwa kalau pun kita bisa sepakat bahwa Indonesia Timur adalah masa depan kita, maka ia bukanlah sesuatu yang jauh, masih di depan dalam ruang dan entah di mana letaknya di dalam waktu. Indonesia Timur adalah kekinian kita, sehingga persoalan-persoalan, dan dengan itu juga berarti seluruh peluang, sudah ada di sini pada hari ini juga. Mengandaikan Indonesia Timur sebagai masa depan bukan berarti kita bisa menunda prioritas dan komitmen bersama kita untuk menjadikan wilayah tersebut lebih baik. Karena kalau ia masa depan kita maka ia otomatis merupakan masa kini dan masa lalu kita pula.

Hadirin yang berbahagia,
 Izinkan saya menuturkan ulang secara bebas dan longgar ucapan salah satu sastrawan terbesar dunia, almarhum Pramoedya Ananta Toer. Pak Pram berkali-kali menyampaikan bahwa tulisan adalah anak-anak ruhani penulisnya. Tulisan akan selalu memiliki kehidupannya sendiri yang bukan hanya terlepas dari kontrol melainkan bahkan melampaui umur penulisnya sendiri. Ucapan Pak Pram mungkin lebih ditujukan kepada karya-karya sastra, tapi sampai derajat tertentu itu mungkin juga berlaku bagi karya-karya non-sastra.

Maka kalau kita merujuk pada ucapan Pram tersebut, seorang penulis yang sangat fasih menuturkan ulang isi tulisannya ia mungkin seorang pembicara atau mungkin saja seorang ilmuwan yang hebat, tapi yang pasti ia adalah penulis yang gagal. Ia seperti orang tua yang terlalu cerewet dan serba *sok* tahu tentang kehidupan anaknya. Ia gagal melahirkan anak-anak ruhani yang

bebas menentukan nasibnya sendiri. Ia gagal membiarkan karyanya berbicara sendiri tanpa penulisnya harus gopoh dan heboh menjelas-jelaskan kepada pembacanya. Tugas penulis setelah tulisannya dipublikasikan bukan banyak bicara tentang karyanya, melainkan (mungkin untuk berleha-leha sebentar) menulis karya-karya berikutnya. Penulis, atau siapa saja sebenarnya, yang terlampau banyak bicara, alih-alih bekerja atau berkarya, mungkin memang hanya pantas menjadi gubernur DKI Jakarta (atau provinsi lain yang bersedia memilihnya).

“seorang penulis yang sangat fasih menuturkan ulang isi tulisannya ia mungkin seorang pembicara atau mungkin saja seorang ilmuwan yang hebat, tapi yang pasti ia adalah penulis yang gagal.

Melalui peluncuran buku malam ini kami ingin melepas anak-anak ruhani kami tanpa pretensi menjadi juru bicara mereka di hadapan para pembacanya. Sejak malam ini, semua penulis yang berkontribusi pada penulisan buku ini statusnya masing-masing kembali menjadi pembaca. Kami ingin berterima kasih kepada semua pihak yang telah menolong kami selama kami

mengerami anak-anak ruhani kami itu berbilang-bilang bulan lamanya sampai ketika kami harus mengejan untuk melahirkannya.

Hadirin yang terhormat,

Kata orang, menulis adalah dedikasi kepada masa depan, kalau pun bukan untuk masa depan keabadian paling tidak sampai saat ketika ia dipublikasikan. Tapi justru karena itu pula ia adalah proses-proses kerja penulisnya hari ini dan kemarin sekaligus. Di era kapitalisme digital saat ini, jarak temporal antara ketika sebuah karya ditulis dan saat ia dipublikasikan semakin kecil. Teknologi telah mengambilalih sebagian besar keajaiban dan memperkecil jarak bukan hanya ruang tetapi juga waktu. Artinya, kalau begitu, masa depan tidaklah selalu berpasangan dengan ruang yang jaraknya jauh. Kalau Indonesia Timur adalah masa depan kita, maka ia adalah kerja-kerja, hidup kita, sejarah kita hari ini dan kemarin pula.

Ke Timur Haluan Menuju karena timur bukan eksterioritas dari kita yang terletak nun jauh entah di mana. Ia adalah di sini dan hari ini.

Terima kasih.

Jakarta, 20 Juni 2019
hikmat budiman



Daniel Dhakidae lahir di Toto-Wolowae, Ngada, Flores, 22 Agustus 1945. Dhakidae meraih gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1975. Kemudian, beliau melanjutkan studi *Master of Art* bidang Ilmu Politik dari

Cornell University pada tahun 1987 dan meraih gelar PhD di bidang Department of Government Cornell University, Ithaca, New York, Amerika Serikat dengan disertasi berjudul *The State, The Rise of Capital, and The Fall of Political Journalism, Political Economy of Indonesian News Industry* pada tahun 1991.

Pria asal Flores ini berkecimpung dalam dunia media dan penelitian. Pada tahun 1979 – 1984, beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Redaksi Majalah Prisma. Pada saat yang sama, dari 1982-1984, Daniel Dhakidae juga duduk sebagai Wakil Direktur Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan, Ekonomi dan Sosial (LP3ES). Ia juga tercatat sebagai salah satu pendiri Yayasan Tifa dan pernah duduk sebagai Dewan Pengarah. Selanjutnya, pada 1994 – 2006, menjadi Kepala Penelitian Pengembangan (Litbang) Kompas.

Beberapa karya akademik pernah ditulis oleh Daniel Dhakidae, di antaranya adalah *Cendekiawan dan Kekuasaan: Dalam Negara Orde Baru* pada tahun 2003 dan *Menerjang Badai Kekuasaan: Meneropong Tokoh-Tokoh dari Sang Demontran, Soe Hok Gie, Sampai Putra Sang Fajar, Bung Karno* pada tahun 2015. Beliau pun bersama Vedi Renandi Hadiz menyunting buku *Social Science and Power in Indonesia* pada tahun 2005.

Memutar Haluan Perahu Ke Timur^{1*}

Daniel Dhakidae

Penerbitan buku *Ke Timur Haluan Menuju* bisa dilihat sebagai momen baru bagi studi-studi yang dikerjakan anak bangsa tentang Indonesia Timur, setelah terbit buku *Kota-kota di Sulawesi*, 2016; meski perlu ditambahkan penerbitan *Kota-kota di Sumatra*, 2012. Indonesia Timur lebih menjadi tujuan Eropa Selatan yang lebih dikenal sebagai the *Iberian Peninsula*, sebegitu rupa sehingga Paus di Vatikan harus berintervensi untuk membagi dua tujuan bagi dua negara yang menjadi negara digdaya pada abad 15-16 untuk berbagi arah: Spanyol ke Barat dan Portugal ke Timur; meski duaduanya terkejut akhirnya bertemu dan bertempur di Timur baik itu di Cina Selatan, maupun di Maluku.

Indonesia Timur bagi Indonesia modern menjadi wilayah yang jauh ... baik dari segi waktu maupun dari

1 * Orasi yang dibawakan untuk peluncuran buku *Ke Timur Haluan Menuju* dalam rangka perayaan ulang tahun ke Tujuh, Populi Center, 20 Juni 2019, Jakarta Design Center, Jakarta.

segi jarak, *in terms of space and time*. Semua jarak diukur dari Jakarta/Jawa. Perjalanan berjam-jam terbang di udara, dan bermalam-malam mengarungi laut menjadikannya jauh tak terbayangkan; tetapi Ambon kan dekat untuk orang Ambon, dan Maluku dekat untuk orang Maluku; Manado dekat untuk orang Manado. Tenggelam dalam abad-abad lalu membutuhkan pandangan kebanyakan orang apa lagi para milenial---seolah-olah semuanya “pernah terjadi dalam dunia khayalan”, dan miopia historis menjadikannya semakin parah.



.....Kalau sekiranya dikatakan Indonesia Timur adalah masa depan itu juga bukan sekedar pemanis bibir.

Akan tetapi inilah wilayah yang menentukan *to be or not to be* Indonesia itu sendiri. Negara Indonesia Timur adalah negara bagian yang paling lengkap institusi kenegaraan; penggabungan ke Indonesia kesatuan terjadi paling akhir dan menentukan kelengkapan wilayah; tanpa NIT Indonesia tidak akan menjadi Indonesia seperti sekarang. Irian Barat menjadi penentu utuh atau tidak utuhnya Indonesia itu. Republik Maluku Selatan menjadi duri dalam daging Indonesia muda, dan sampai hari ini menjadi duri dalam daging Kerajaan Belanda di negerinya sendiri di Eropa.

Karena itu kajian dan diskusi tentang Indonesia Timur bukan sekedar tambahan acara, akan tetapi itulah

masa depan karena kekayaan maritim yang dikandungnya adalah terbesar di republik ini, lebih besar dari gabungan semua wilayah lain. Kalau sekiranya dikatakan Indonesia Timur adalah masa depan itu juga bukan sekedar pemanis bibir.

Namun, pembahasan tentang Indonesia Timur mengalami berbagai kendala dari aksesibilitas fisik sampai metodologis dan lain-lain seperti yang akan diungkapkan oleh kertas kerja ini, karena dirangsang oleh buku *Ke Timur Haluan Menuju*.

Pendekatan-pendekatan Penulisan Sejarah Indonesia

Bertahun-tahun lalu sejak 1950-an hampir semua ilmuwan sosial--- sejarah, sosiologi, antropologi---sama sekali merasa tidak puas dengan pendekatan sejarah ketika membicarakan Indonesia. Sejarah Indonesia dilihat dari kacamata Eropa, dan karena itu menjadi Eropa-sentris.

Karena itu dicoba ditulis sejarah dengan Indonesia sebagai titik pusat. Akan tetapi tetap juga tidak berhasil karena hanya bergeser dari Eropa sentris menjadi Jawa sentris. Sampai hari ini pun tidak terbit buku ilmu-ilmu sosial, sejarah, dengan orientasi semacam itu yang benar-benar berarti. Beberapa usaha dibuat seperti Nugroho Notosusanto yang menulis sejarah Indonesia mutakhir dengan militer sebagai titik pusat. Namun, penulisan sejarah semacam itu menjadi absurd ketika semuanya dipaksakan masuk ke dalam kerangka yang sudah dibuatnya sendiri. Apa akibatnya? Kita mendapatkan sejarah yang “*a-historis*”, *an a-historical history*”, suatu *oxymoron* yang menyakitkan.

Mari kita pusatkan perhatian ke Indonesia Timur, dalam pengertian Belanda yang menyangkut

apa yang disebut sebagai *de groote Oosten*, Timur Raya, yang mencakup Borneo, Celebes, *de Kleine Soenda Eilanden*, Maluku, dan Papua; di sana sejarah penjajahan meninggalkan berbagai nuansa penting. Bila Nusa Tenggara Timur diambil sebagai contoh maka kita lihat bahwa Nusa Tenggara Timur pada umumnya belum/ tidak masuk ke dalam wilayah penjajahan Belanda. Dijajah Belanda dalam arti administrasi *Pax Neerlandica* baru berlangsung pada tahun 1917, yang terakhir dari semuanya. Belanda menjalankan politik penjajahan yang disebut sebagai “*onthoudende politiek*”, politik menjauhkan diri, dengan membiarkan seluruh wilayah ini untuk mengurus dirinya sendiri, semuanya diserahkan kepada sukunya masing-masing, kepala suku yang mengatur sendiri wilayahnya.

Sejarah Lokal, dan Historiografi

Kemerdekaan Indonesia dengan sendirinya melahirkan “pendewaan” terhadap tokoh-tokoh tertentu yang berperan besar. Fase berikutnya adalah lahirnya konsep tentang pahlawan-pahlawan kemerdekaan. Ada semangat yang sangat besar dari “bawah”, yaitu dari daerah-daerah untuk memperdekat jarak antara apa yang terjadi di daerah dengan apa yang dipahami “pusat” tentang kepahlawanan.

Sesuatu yang tadinya menjadi dorongan/motivasi lama-kelamaan menjadi nafsu “mencari” pahlawan dalam konteks lokal. Dalam arti historiografi semuanya menimbulkan berbagai soal, antara lain masalah otonomi sejarah lokal, seperti yang dipersoalkan Prof. Taufik Abdullah. Sejarah lokal pada dasarnya otonom, yang berarti tidak perlu dicari hubungannya dengan apa yang dianggap sejarah “nasional” karena “nasional” pada dasarnya adalah suatu abstraksi politik dalam arti khusus

yaitu semacam *hogere optrekking* dalam konsep politik setelah suatu struktur politik menjadi lebih baku. Semua yang disebut sebagai nasional sangat tergantung dari seberapa tinggi kadar integrasi secara multi-dimensional. Hal tersebut menjadi soal baik sekarang pada masa kemerdekaan, maupun dulu pada masa kolonial.



.....sumbangan paling penting buku ini adalah memberikan kepada kita beberapa konteks besar yang tanpa itu sejarah Indonesia Timur tidak mungkin bisa ditulis.

Upaya besar-besaran mencari tokoh-tokoh lokal sangat erat hubungannya dengan peran tokoh tersebut dalam masa kolonial. Ini pada gilirannya sangat tergantung pada the nature of the colonialism. Karena itu memukul rata bahwa seluruh wilayah yang sekarang disebut Indonesia dijajah 350 tahun adalah sesuatu yang sangat riskan dari aspek historiografis. Retorika “dijajah 350 tahun” hanya penting bagi kepentingan politik kolonial, dan sama sekali tidak berguna bagi suatu metode penulisan sejarah Indonesia pada umumnya, dan terutama lagi bagi penulisan sejarah lokal kolonial, dan pasca-kolonial.

Kedua, yang disebut sebagai nasional akan menjadi

“tinggi” kadar abstraksinya ketika negara kesatuan sudah terbentuk, dan bersama dengan itu birokrasi dan birokratisasi banyak konsep lainnya menjadi salah satu turutannya. Ketika Jakarta menjadi ibukota, yang dalam dirinya menjadi “ibu” dari semua kota, maka apa saja yang terjadi di Jakarta adalah “nasional”. Yang terjadi di semua lapisan di bawahnya menjadi “regional”, dan “lokal”. Ketika birokratisasi dalam segala bidang semakin mendukung Jakarta maka semakin sesuatu itu berada di atas puncak birokrasi, semakin nasional sesuatu itu menjadi.

“

..... apa saja yang terjadi di Jakarta adalah “nasional”. Yang terjadi di semua lapisan di bawahnya menjadi “regional”, dan “lokal”.

Yang dikatakan seorang menteri adalah nasional, sedangkan yang dikatakan oleh seorang bupati adalah lokal, sampai dia mengganggu “kepentingan nasional”. Yang lokal baru diangkat ke drajat nasional ketika mengganggu yang disebut “nasional”. Waktu itu baru Papua “nasional”; Aceh menjadi “nasional”, karena itu pemberontakan menjadi salah satu strategi pembangkit kesadaran historis lokal dan nasional dan menjadi semacam *existential requirement*.

Ini akan melahirkan pertanyaan lanjutan apakah

peristiwa yang berlangsung di Sumatra adalah “*my history*”. Atas dasar apa sejarah Imam Bondjol, Perang Aceh, menjadi *my history*. Itu juga yang menjelaskan mengapa presiden PDRI yang berkedudukan di Padang tidak pernah masuk ke dalam rentetan susul-menyusul dari presiden-presiden RI---untuk tahu itu datanglah ke gedung MPR. Padang bukan nasional; keterlibatannya dalam PRRI semakin memperkeruh ketokohnya. Pemberontakan yang tadinya menjadi *existential requirement* menjadi *existential stumbling block*.

Pertemuan kita malam ini adalah nasional, terlepas dari mutunya, karena berlangsung di ibu kota; akan tetapi kalau pertemuan ini berlangsung di Ambon maka akan diberi kategori lokal. Ketegangan itu tetap terasa sampai hari ini; suatu ketegangan yang tidak berguna baik secara scientific pada umumnya maupun historiografis khususnya. Namun, meskipun tidak berguna ia menunjukkan soal lain yang lebih dalam di baliknya.

Semua yang disebut di atas menghantar kita kepada hubungan yang riskan antara sejarah lokal dan sejarah nasional. Pertanyaan paling utama di sini adalah apakah memang ada sejarah nasional. Kalau, kebangsaan atau “*nation*” adalah “*imagined communities*” maka “rasa kebangsaan” atau “nationalisme” adalah dengan demikian menjadi “sentimen” yang memungkinkan “*imagined communities*” hidup dan beraksi, suatu konsep yang menarik, kritikal, akan tetapi juga kontroversial.

Namun, semuanya akan menjadi jauh lebih kompleks ketika “*nationhood*”, “*nationalism*” diharapkan menjadi dasar dari suatu historiografi untuk melihat sejarah “nasional Indonesia” dan sejarah “lokal”. Semuanya akan menjadi semakin kompleks lagi ketika dua paham di atas memasuki bidang penulisan sejarah yang

sudah diawali sejak sekurang-kurangnya akhir tahun 1970-an yang disponsori oleh negara Orde Baru dan menjadikan sejarah sebagai sejarah kaum pemenang. Dalam hubungan itu hanya ketika saya merasa Imam Bondjol bagian dari sentimen kebangsaan saya dia menjadi *my history*.

Beberapa Kontribusi Buku ini

Buku ini memberi kesadaran kepada kita semua tentang perbedaan jenis kolonialisme yang dijalankan di Indonesia. Dengan penjajahan ekstraktif Belanda menjalankan sistem penjajahan berbeda di Maluku dibandingkan dengan di Jawa; demikian pun di Sumatra. Di Maluku penjajahan ekstraktif itu dijalankan dengan sistem *perkenierschap*, *perkenierstelsel*. “Perken” tidak lain dari mengambil/memisahkan tanah tertentu dari kebun besar, *afgezet stuk van een tuin*, dan menanamkan tanaman dagang seperti pala untuk Eropa.



Karena itu saya berdoa agar presiden Jokowi berhasil pindahkan ibukota dari Jakarta ke Palangka Raya. Dengan demikian “Nusa Tenggara” menjadi meaningful, benar-benar tenggara dari ibukota, ibu semua kota bangsa ini.

Penjajalah ekstraktif di Jawa dengan *cultuurstelsel*, mewajibkan penanaman tanaman dagang tertentu untuk

pasar Eropa. Penjajahan ekstraktif di Sumatra mungkin jauh lebih kompleks dari segi *political economy* yaitu suatu sistem perkebunan besar dengan kapital besar yang menuntut infrastruktur besar dan karena itu memerlukan buruh dalam jumlah besar yang harus diimpor dari Jawa dengan berbagai soal yang ditinggalkannya sampai hari ini.

Dengan semua yang dikatakan di atas sekurangnya kita mengenal tiga jenis penjajahan ekstraktif dipraktekkan di sini: *Perkenierstelsel* yang lebih bersifat *land-oriented*; *Cultuurstelsel* yang *product-oriented*; dan *combined system* di Sumatra yang merupakan gabungan antara keduanya dengan tambahan sangat menentukan dalam bentuk *forced labor movement* dari Jawa yang secara halus/netral disebut sebagai transmigrasi, dengan semua konsekuensi sosial dan politik di dalamnya.

Namun, sumbangan paling penting buku ini adalah memberikan kepada kita beberapa konteks besar yang tanpa itu sejarah Indonesia Timur tidak mungkin bisa ditulis. Tiga konteks sosial paling utama untuk penelitian Indonesia Timur adalah sebagai berikut:

Konteks kolonial. Ini harus diperiksa dengan sangat teliti karena perbedaan *the nature of colonialism* di Indonesia Timur dengan wilayah-wilayah lainnya. Konteks kolonial Maluku berbeda jauh dengan konteks kolonial Nusa Tenggara Timur, misalnya. Demikian pun Papua jelas mengandung sesuatu yang sangat berbeda dari dua wilayah ini. Demikian pun Sulawesi jauh berbeda lagi karena kehadiran kerajaan-kerajaan tua yang lengkap dengan monografi historis.

Contoh yang paling praktis di sini adalah masalah pertanahan. Undang-undang agraria yang berlaku di Jawa tahun 1870 boleh dikatakan sama sekali tidak berlaku di

Indonesia Timur pada umumnya, baik karena seluruhnya tidak/belum masuk ke alam administrasi kolonial. Karena itu masalah tanah diserahkan sepenuhnya kepada tuan-tuan tanah, dan raja-raja lokal.

Penjajahan di NTT sangat berbeda hakekatnya dibandingkan dengan wilayah lain. Akibatnya, kita dihadapkan dengan Belanda kolonial, seolah-olah itulah Belanda seperti yang ada di Jawa, di Sumatra atau bahkan Belanda di Maluku. Jelas keliru paham dan titik-tolak semacam ini, karena Flores baru masuk ke dalam perhitungan Belanda ketika perjanjian dengan Portugis tahun 1851 menyerahkan Flores kepada Belanda. Itu pun politik kolonial Belanda terhadap NTT secara keseluruhan adalah “*onthouding*”, menjaga jarak, “*niet bestuuren*”, tidak memerintah, atau yang secara tegas dikatakan “tidak memerintah, menjauhkan diri dari semua urusan, cukup dengan mengawasi”.

Dengan itu kita lihat bahwa yang bernama Indonesia Timur itu berbagai jenis, bila dilihat dari segi historiografi: Celebes dengan seluruh kekhususannya; Nusa Tenggara, saya sama sekali tidak suka nama ini, nama a-historis, flat, geografikal. *Kleine Soenda Eilanden* lebih bermartabat di sana meski ada unsur *kleine* di sana. Tenggara dari mana? Dari Jakarta? Dari Jakarta semuanya menjadi “nusa Timur”. Lebih tepat dari Beijing, ibukota dunia tengah Tiongkok, Chungkok---yang menjadi sasaran hoax masa kini. Sangat menarik bahwa perubahan nama Nusa Tenggara tidak ditandatangani oleh Presiden Soekarno akan tetapi oleh pejabat presiden, karena Bung Karno sedang dalam serentetan perjalan ke luar negeri.

Karena itu saya berdoa agar presiden Jokowi berhasil pindahkan ibukota dari Jakarta ke Palangka Raya. Dengan demikian “NusaTenggara” menjadi *meaningful*,

benar-benar tenggara dari ibukota, ibu semua kota bangsa ini.

Konteks eklesiastikal, yaitu masuknya gereja ke dalam masyarakat Indonesia Timur pada umumnya. Tidak bisa memahami Indonesia Timur tanpa memahami struktur kegerejaan di sana, baik Sulawesi, Maluku, maupun di Papua.

Di bidang ini struktur gereja katolik lain dengan struktur gereja Kristen-protestan. Konteks gereja kristen-katolik tua jelas-jelas berbeda dari konteks kristen-katolik ketika terjadi holandisasi gereja katolik dengan Batavia sebagai pusat. Kristen-katolik purba adalah gereja-gereja lokal dengan warna lokal yang sangat ketat. Semua ini akan memberikan pengaruh yang tidak kecil terhadap semua hal lain lagi. Boleh dikatakan tidak ada kontrol hirarki gereja Katolik, seperti pastor, uskup dan sebagainya.

Konteks Islam. Islam yang berkembang di Indonesia Timur sedikit berbeda dari awal, karena islam Indonesia Timur tidak melalui Jawa, akan tetapi langsung dari semenanjung Melaka --> Makassar --> Solor-Alor/ Flores --> Kei dan seterusnya. Karena itu “kemurnian ajaran” akan lebih terjaga, dan sedikit berbeda dari Islam yang cenderung mistikal seperti di Jawa.

Selain konteks diberikan di sana apa sumber dari suatu wilayah yang begitu minim sumber tertulis; karena itu buku ini mengerjakan dan mengolah dengan bagus sumber lisan dan menjadikannya *oral history* yang menarik. *Oral history* adalah salah satu sumber terbesar dalam meneliti masalah sejarah Indonesia Timur pada umumnya.

Namun *oral history* harus dipakai dengan ekstra hati-hati. Nilai positif dari *oral history* adalah rekaman yang berada di dalam *collective memory* dari masyarakat yang

boleh dikatakan “tidak memiliki sejarah”. Namun, *collective memory* tersimpan dengan rapih dalam beberapa tempat berikut ini:

Pribadi-pribadi tua maupun muda karena masing-masing memperoleh warisan tradisi lisan turun-temurun. Meskipun boleh dikatakan bahwa semua memiliki itu akan tetapi para *local genius* adalah orang-orang yang karena pengetahuan dan wibawa adat bisa diandalkan sebagai sumber yang bisa dipegang. Dengan demikian *local knowledge* bisa dimanfaatkan dengan seefektif mungkin. Di sini pun perlu hati-hati karena wibawa pengetahuan seorang narasumber lokal tidak cukup, karena harus disertai pula oleh wibawa moral sehingga reliabilitas bisa menjadi pegangan para peneliti.

Dengan memenuhi beberapa persyaratan di atas sejarah lokal berada dalam konteks dan kontekstualisasinya pada prinsipnya memiliki kemampuan mengikat yang lokal dengan regional, dan keduanya diikat menjadi nasional melalui konsep *nasion* dan bukan karena ditentukan birokrasi Jakarta.

Beberapa Catatan Penutup

Dengan Indonesia Timur sebagai titik tolak dalam perjalanan orasi ini pembicaraan tidak lagi sekedar tentang Indonesia Timur akan tetapi masuk ke dalam *the nature of extractive colonialism* itu sendiri yang selama ini selalu dibayangkan sebagai sama dan seragam. Ketika kita masuk lebih dalam ternyata terdapat nuansa penting seperti apa yang berlaku di Indonesia Timur, Jawa, dan Sumatra yang menentukan perkembangan wilayah-wilayah itu kelak pada masa pasca-kolonial.

Perkenierschap/perkenierstelsel memungkinkan naiknya *private capitalist* yang memanfaatkan konsesi-konsesi tanah

yang dipakai untuk komoditas di pasar Eropa; dengan *cultuursetelsel* dihasilkan komoditas murah di tanah jajahan yang dijual mahal di pasar kontinental. Jenis kolonialisme ekstraktif Sumatra selain menghasilkan komoditas seperti di atas sambil menyisakan masalah sosial sebagai akibat dari *forced movement of labor* yang masih memberikan dampak sampai hari ini.

Semuanya menghantarkan kita kepada suatu kesimpulan bahwa dengan begitu Indonesia Timur bukan lagi Indonesia Timur akan tetapi Indonesia yang harus diperiksa berulang kali, seperti yang dilakukan Populi Center dengan penelitian dan penerbitannya yang memberikan inspirasi untuk bermacam hal ke depan.*

**Agustinus**

Prasetyantoko lahir pada 10 Agustus 1973. Menempuh pendidikan Strata Satu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada pada tahun 1992 –1997. Gelar Master of Science dari *Université de Science et Technologies de Lille* (USTL)

University of Lille I, ia raih pada 2002, dan pendidikan Doktor (PhD) Ekonomi pada *Ecole Normale Supérieure (ENS)*, berkolaborasi dengan University of Lyon II, ia tempuh pada 2004 – 2008.

Tercatat sebagai dosen di Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, Jakarta, sejak 1998, pada 2015 pria yang akrab disapa Pras ini terpilih sebagai Rektor di universitas tersebut sampai saat ini. Sebelumnya, di universitas yang sama ia pernah menjadi Dekan Fakultas Administrasi Bisnis dan Ilmu Komunikasi pada Oktober 2012 hingga 2015. Di luar kampus, Pras pernah menjadi Kepala Ekonom PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada Juni 2013 hingga Mei 2015.

Sebagai seorang akademisi, Prasetyantoko aktif menulis dalam banyak karya ilmiah baik berupa kontributor dalam penulisan buku, artikel ilmiah dalam berbagai jurnal, maupun opini di media massa nasional.

“Ke Timur Haluan Menuju”

Membangun Visi Ekonomi Masa Depan

Ulang Tahun ke-7 Populi Center, Juni 2019

A. Prasetyantoko

Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya; Pembina
Yayasan Populi Indonesia

Pertama, selamat ulang tahun ke-7 untuk Populi Center. Pada usia yang ke-7 ini Populi mencoba menegaskan posisinya tak hanya sekedar lembaga survei, namun bermimpi menjadi pusat pengetahuan yang memberi kontribusi nyata bagi pembangunan (khususnya demokrasi) di Indonesia. Kedua, usia yang ke-7 ini sekaligus menjadi wahana untuk menegaskan cita-cita tersebut dengan cara menajamkan arah ke mana biduk organisasi ini akan menuju melalui proses refleksi terhadap dialektika proses yang telah dilalui. Dengan cara itu, arah masa depan menjadi lebih tergambar dengan fokus yang jelas.

Salah satu wujud nyata upaya Populi menegaskan posisinya sebagai pusat pengetahuan, tak sekedar lembaga

survei, adalah penerbitan buku yang ditulis sebagai hasil penelitian dengan judul “Ke Timur Haluan Menuju”. Selamat kepada Populi atas penerbitan buku ini dan terima kasih kepada para peneliti serta semua pihak yang memungkinkan buku hasil penelitian di daerah Kepulauan Maluku dan sekitarnya ini hadir bersama kita.

Jika survei adalah upaya memahami persepsi publik yang dibentuk dari pandangan para individu, studi ini menunjukkan bagaimana dinamika struktural juga terjadi dalam dimensi dan ruang lingkup yang lebih komprehensif dan mendalam. Persepsi publik dan pendapat individu tak bisa dilepaskan dari konteks struktural yang membentuknya.

Buku ini menegaskan sebuah argumen pokok, membangun Indonesia Timur adalah keharusan, jika bukan keniscayaan. Tujuannya bukan sekedar kalkulasi ekonomi jangka pendek dan kepentingan politik elektoral belaka, namun lebih jauh dan mendasar, yaitu memenuhi janji sejarah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu, pilihan kebijakan “Indonesia sentris” dan bukan Jawa apalagi Jakarta sentris adalah sebuah keutamaan, seberapapun biaya ekonomi dan politik yang harus ditanggung.

Secara historis, seperti ditunjukkan buku ini, wilayah Indonesia Timur dalam hal ini Maluku dan sekitarnya merupakan jantung dari denyut nadi perdagangan yang menjadi perhatian negara-negara besar saat itu, seperti Spanyol, Portugis, Inggris dan Belanda.

Kebetulan penulis menerima buku (dalam bentuk *softcopy*) ketika dalam perjalanan di Eropa menyusuri sejarah perang dunia (I dan II), dan secara khusus menyusuri kanal Amsterdam dan museum maritim di mana terpampang kapal VOC yang pada waktunya

menjadi moda transportasi utama, menuju pusat komoditas utama dunia, khususnya cendana, cengkik dan pala.

Indonesia Sentris

Kepulauan Maluku pernah menjadi salah satu sentra perdagangan yang kemudian mengantarkan Indonesia pada kolonisasi. Meski kaya akan komoditas yang diperhitungkan dalam perdagangan dunia, tetapi peran lokal terpinggirkan. Pembangunan fisik dan manusia nyaris



Tujuannya bukan sekedar kalkulasi ekonomi jangka pendek dan kepentingan politik elektoral belaka, namun lebih jauh dan mendasar, yaitu memenuhi janji sejarah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

tak terjadi, sementara kekayaan komoditasnya dikeruk habis. Namun fakta bahwa Maluku berperan dalam perdagangan dunia serta posisinya diperhitungkan tak bisa dipungkiri. Justru dari pengalaman historis ini, ada beberapa pelajaran berharga yang perlu kita petik.

Pertama, soal ketergantungan pada komoditas alam. Sejarah menunjukkan kita punya kekayaan alam yang luar biasa dan pada gilirannya menghasilkan komoditas yang membuat kita diperhitungkan. Namun, komoditas dalam ekonomi mengalami sebuah siklus (*commodity cycle*) yang

memerlukan antisipasi. Belajar dari pengalaman sejarah, begitu komoditas utama seperti cendana, cengkeh, pala dan rempah-rempah lainnya harganya surut, Maluku dan wilayah timur Indonesia yang tadinya berjaya habis begitu saja, menjadi seonggok tanah yang gersang, tak memberi harapan bagi penghuninya. Maluku dan sekitarnya hilang dalam peradaban seiring dengan melemahnya peran komoditas yang dihasilkan dalam siklus perdagangan dunia.

Situasi ini persis yang dialami bumi Timur Indonesia, yang diwakili wilayah Kepulauan Maluku, yang meliputi Halmahera Utama (Kab. Maluku Utara), Kota Ambon, Banda Neire (Kab. Maluku Tengah), dan Pulau Geser (Kab. Seram Timur). Begitu komoditas pala, cengkeh, kayu manis dan lainnya meredup, mereka pun ditinggalkan begitu saja, sementara bumi dan manusianya sudah porak-poranda. Tak heran jika setelahnya, daerah ini dilanda konflik ganas yang makin meredupkan peradapan mereka.

Pengalaman serupa kita alami sebagai bangsa modern baru-baru ini. Sepanjang 2008-2012 kita mengalami fase booming komoditas yang membuat daerah penghasil batubara dan minyak sawit (CPO) seperti Sumatra Utara dan Kalimantan begitu bergairah. Namun begitu booming komoditas berakhir, mereka menghadapi fakta getir, tanah mereka tandus, tak ada sektor ekonomi lain yang berkembang.

Kedua, soal keterlibatan masyarakat lokal. Saat globalisasi ekonomi berada pada fase primitif melalui kolonialisasi, peran masyarakat lokal benar-benar dipinggirkan dengan cara yang paling keras sekalipun. Seperti pembunuhan 44 orang kaya di Pulau Banda.

Pertanyaannya, di era modern ini bagaimana

peran masyarakat lokal diakomodasi? Diperlukan langkah nyata untuk melibatkan mereka secara aktif dalam mata rantai ekonomi yang memberi nilai tambah. Untuk itu diperlukan dua hal; pembangunan industri pengolahan atau sektor ekonomi yang memiliki nilai tambah tinggi dan peningkatan kapasitas masyarakat lokal. Instrumen pendidikan vokasi akan menjadi penting di masa depan. Pemerintah harus hadir untuk bersama dengan pemerintah daerah merumuskan kebutuhan konkrit keahlian di wilayah tersebut serta membangun sentra pelatihan (formal dan tidak formal) guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja trampil yang diperlukan.

Secara umum, diperlukan pendekatan yang berbeda untuk melibatkan masyarakat lokal dalam mata rantai perekonomian. Pendekatan yang dipilih Presiden Joko Widodo dalam periode pemerintahan 2014-2019 adalah terobosan besar, melalui prinsip Indonesia Sentris. Pendekatan ini menemukan relevansi yang amat besar jika diletakkan dalam konteks sejarah, sebagaimana dituliskan oleh para peneliti Populi dalam buku yang diluncurkan ini.

Bagaimana Indonesia bagian Timur hari ini?

Sepanjang 2018 lalu, ekonomi kita mampu tumbuh sebesar 5,17 persen. Sumbangan Jawa dan Sumatra (Indonesia Bagian Barat) masih dominan, masing-masing 58,48 persen dan 21,58 persen. Jadi jika Jawa dan Sumatra digabung, maka Indonesia Bagian Barat menguasai 86,06 persen. Hanya kurang dari 20 persen saja, kontribusi Indonesia Bagian Timur.

Berita baiknya, Indonesia Bagian Timur tumbuh lebih tinggi dari rata-rata nasional. Maluku dan Papua tumbuh 6,99 persen dan Sulawesi 6,65 persen. Di

daerah ini, peran pemerintah masih dominan. Alokasi pembangunan infrastruktur akan mengakselerasi pertumbuhan sebelum kemudian menimbulkan efek pengganda yang ditimbulkannya.



Berita baiknya, Indonesia Bagian Timur tumbuh lebih tinggi dari rata-rata nasional. Maluku dan Papua tumbuh 6,99 persen dan Sulawesi 6,65 persen.

Bagaimana menerjemahkan pedekatan pembangunan Indonesia sentris ini, khususnya mengakselerasi pembangunan di wilayah Timur Indonesia. Tekad Presiden Joko Widodo untuk membangun infrastruktur di luar Jawa dalam narasi besar membangun dari pinggiran merupakan langkah paling nyata.

Pertama, rekam jejak Presiden Joko Widodo dan Tim Kabinet Kerja sungguh mengagumkan. Selama 4 tahun tahun pemerintahannya, Jokowi berhasil membangun 941 Km jalan, atau hampir dua kali lipat dari jalan yang mampu dibangun Soeharto selama berkuasa 32 tahun sepanjang 490 Km. Juga melebihi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dalam 10 tahun mampu membangun 212 Km.

Kedua, dengan mulai dibangunnya infrastruktur fisik, justru kebutuhan pembangunan dimensi lainnya

menguat kemendesakannya. Membangun infrastruktur fisik, jika tak dibarengi dengan infrastruktur lainnya, seperti manusia dan kelembagaan masyarakatnya tak akan berfungsi maksimal. Dengan begitu, agenda yang juga sudah dicanangkan Presiden Joko Widodo pada era- 5 tahun ke depan yang akan fokus pada kompetensi manusia memunculkan secercah harapan, yang selama ini tak pernah ada.

Dan dengan begitu, harapannya semua sudut pulau yang ada di Indonesia ini memiliki visi, cita-cita dan harapan yang sebangun tentang masa depannya.

Indonesia di Masa Depan

Menjadi sebuah bangsa pada esensinya adalah membangun visi bersama tentang masyarakat yang ingin dituju di masa depan. Jika dalam sebuah bangsa visi ke depannya berbeda-beda, maka bangsa itu akan lemah, penuh konflik dan perpecahan. Maka kekuatan seorang pemimpin adalah membangun visi masa depan, agar energi bangsa tertuju padanya. Tugas pemimpin adalah menentukan destinasi, selain memprakarsai berbagai cara dan upaya tentang bagaimana mencapainya.

Baru-baru ini, sebuah firma konsultan global Price Waterhouse Cooper (PwC) menerbitkan laporan komprehensif berjudul “The Long View: How will the global economic order change by 2050?”. Dalam analisis ini, Indonesia yang pada 2016 berada di peringkat ke-8 ekonomi terbesar dunia, pada 2050 diproyeksikan naik menjadi peringkat ke-4, setelah China, India dan Amerika Serikat. Tentu bisa menjadi rujukan penting untuk membayangkan bagaimana Indonesia di masa depan.

Narasi serupa juga pernah disampaikan firma konsultan lainnya, yaitu McKinsey Global Institute (MGI)

yang pada September 2012 merilis laporan berjudul “The archipelago economy: unleashing Indonesia’s potential”. Isinya kurang lebih sama, yaitu soal prediksi mengenai peningkatan perekonomian Indonesia, dari peringkat ke-17 pada 2012 menjadi peringkat ke-7 pada 2030. Tentu saja proyeksi ini bukanlah lampu Aladin yang bisa menyulap perekonomian Indonesia begitu saja menjadi besar. Kajian tersebut hanya menunjukkan jika kita memiliki potensi, soal realisasi, masalahnya lain lagi.

Kita mudah terlena dengan optimisme yang dihembuskan, tanpa memahami kerja keras macam apa yang diperlukan agar proyeksi tersebut terlaksana. Dari kajian McKinsey misalnya, ada prasyarat yang harus dipenuhi agar kita bisa menjadi negara besar. Paling tidak ada dua. Pertama, meningkatkan produktivitas perekonomian, yang salah satunya ditandai dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja yang bertambah sekitar 60 persen pada periode 2010 hingga 2030 nanti. Kedua, mampu memperbaiki kesenjangan perekonomian agar pencapaian pembangunan tak porak-poranda akibat kekacauan politik dan sosial. Hanya dengan dua cara tersebut, potensi menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia bisa terealisasi. Jika gagal diciptakan prasyarat tersebut, maka tentu saja potensi sulit direalisasikan. Sementara itu, kita tahu persis memperbaiki kinerja (produktivitas) membutuhkan konsistensi kebijakan yang begitu luas dan komprehensif.

Sama dengan McKinsey, proyeksi PwC juga mengandaikan selama 30 tahun ke depan perekonomian kita bisa tumbuh di atas 7 persen. Sebuah asumsi yang pada hari ini sulit dibayangkan, mengingat dalam 5 tahun terakhir seakan kita terperangkap dalam kinerja pertumbuhan moderat (sekitar 5 persen). Dengan kata lain, kita harus bekerja sangat keras mewujudkan potensi ekonomi tersebut.

Dan persis di sini, kita dituntut menjabarkan dalam kebijakan yang konkrit.

Bagaimana gagasan tentang Indonesia dengan segala proyeksi ekonominya ini meletak dalam konteks situasi terkini?



Perangkap pertumbuhan rendah tak bisa dipisahkan dari siklus komoditas yang telah berakhir.

Jika dirujuk situasi yang kita alami sekarang ini, nampaknya proyeksi tersebut masih terlalu optimis, kurang menyusur pada realita yang ada. Sekarang ini, kita tengah bergulat dengan situasi di mana pertumbuhan ekonomi nampak terperangkap dalam besaran moderat, hanya pada kisaran 5 persen saja. Padahal, janji tentang bangsa besar itu, mensyaratkan kita tumbuh lebih tinggi lagi, yaitu sekitar 7 persen.

Perangkap pertumbuhan rendah tak bisa dipisahkan dari siklus komoditas yang telah berakhir. Pada 2011 lalu kita berada pada puncak pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5 persen akibat *booming* harga komoditas. Seiring dengan jatuhnya harga komoditas, pertumbuhan ekonomi juga terus menyusut, menjadi 6,2 persen pada 2012 dan turun lagi menjadi 5,8 persen pada 2013. Pada 2015 kita berada di titik pertumbuhan terendah sebesar 4,88 persen dalam kurun waktu 5 tahun. Setelah itu, pola pertumbuhan mulai *recovery*, namun relatif lambat. Pada 2016 naik menjadi 5,03 persen, pada 2017 menjadi 5,07 persen dan 2018 naik lagi menjadi

5,17 persen. Pada level ini, seakan kita tak memiliki energi untuk tumbuh lebih tinggi lagi.

Keluar dari Perangkap

Pengalaman historis yang dialami daerah Ambon dan sekitarnya mengajarkan dengan pasti, bahwa kita harus keluar dari siklus komoditas. Dan cara yang paling baik adalah membangun basis industri. Sementara industri hanya bisa berkembang jika dua elemen pokok; dukungan infrastruktur yang memadai, serta tenaga kerja yang kompeten.

Dua hal ini tengah menjadi perhatian pemerintah



Buku yang ditulis Populi memberikan gambaran sangat detil, bagaimana dinamika masyarakat Maluku, baik secara historis, antropologis dan sosiologis.

yang akan terus dikembangkan dalam periode 2019-2024 mendatang. Jika dilakukan secara konsisten dan komprehensif, tentu akan menjadi pijakan penting bagi perjalanan bangsa di masa depan. Selama ini, kita tak pernah punya keberanian untuk mendobrak strategi pembangunan.

Akutnya persoalan ekonomi kita bisa dilihat dari symptom besarnya defisit neraca transaksi berjalan. Pada 2018 kita mengalami defisit transaksi berjalan sangat besar,

yaitu sekitar 31 miliar dollar AS atau terburuk sejak 1975. Fakta ini harus menjadi *early warning* dalam membangun perekonomian domestik. Dalam dua tahun terakhir, defisit transaksi berjalan terus membesar. Jika pada 2016 lalu hanya sebesar (-1,82) persen, pada 2017 sebesar (-1,6) persen, pada 2018 lalu melonjak menjadi (-2,98) persen. Defisit transaksi berjalan menunjukkan ketergantungan kita pada sumber daya eksternal dalam mendorong perekonomian kita.

Jika ingin tumbuh lebih tinggi, maka diperlukan transformasi perekonomian agar sumber daya domestik lebih kuat.

Pertama, meningkatkan ekspor non-migas agar lebih banyak revenue dalam bentuk valuta asing masuk pada perekonomian kita. Neraca non-migas memang masih surplus, namun jumlahnya terus menurun. Pada 2016 lalu neraca non-migas surplus sebesar 19 miliar dollas AS dan pada 2018 lalu turun menjadi 11 miliar dollar AS. Ekspor produk non-migas naik, namun kalah dengan kenaikan impor. Penerimaan devisa dalam jumlah besar dari neraca barang non-migas akan menjadi penanda daya saing sektor industri. Penerimaan yang masuk menandakan produk non-migas kita punya daya saing dan mampu menopang aktivitas perekonomian domestik, melalui penciptaan lapangan kerja.

Kedua, meningkatkan penerimaan dari sektor pariwisata yang memang dalam beberapa tahun terakhir sudah mengalami peningkatan cukup signifikan. Jika pada 2016 lalu, wisatawan asing yang datang sekitar 12 juta, pada 2018 lalu sudah mencapai 14 juta dari 15 juta yang ditargetkan. Meski meningkat, namun bila dibandingkan dengan jumlah wisatawan asing negara tetangga, kita masih sangat tertinggal. Malaysia misalnya, jumlah wisatawan yang datang mencapai 25 juta, sementara Thailand sekitar 35 juta. Perlu upaya yang terarah untuk terus meningkatkan

jumlah wisatawan asing ke berbagai destinasi wisata yang disiapkan secara komprehensif, mulai dari transportasi, perhotelan serta sarana logistik lainnya.

Apakah mungkin kita memulai upaya kita menjadi bangsa yang besar dari wilayah Timur Indonesia? Buku yang ditulis Populi memberikan gambaran sangat detail, bagaimana dinamika masyarakat Maluku, baik secara historis, antropologis dan sosiologis.

Peran komoditas penting. Kini harus menemukan komoditas yang mampu membangkitkan kegaitan ekonomi di wilayah tersebut. Membangun infrastruktur tentu saja tak cukup, perlu membangun manusia, sehingga industrinya juga berkembang. Komoditas apa yang bisa dikembangkan? Pariwisata atau agroindustri dan kelautan.

Hanya dengan pembangunan industri, tol laut akan berfungsi dengan baik. Investasi perlu kembangkan dengan berbagai skema insentif. Selama ini tol laut tak efektif, karena tak ada pertukaran komoditas yang setara serta proporsional antar-daerah tersebut. Kapal dari Surabaya ke Ambon, Halmahera penuh dengan barang, tapi apa yang bisa dibawa dari wilayah tersebut? Tak ditemukan jawabannya, karena memang belum dikembangkan secara proporsional komoditas di wilayah setempat.

Meski begitu, kajian sosiologis perlu dilihat agar pembangunan tak meminggirkan masyarakat lokal, seperti yang mereka alami selama ini, atau ratusan tahun lalu di masa kolonial.

Teknologi bisa sangat membantu merekatkan kawasan wisata dengan pasar global. Namun infrastruktur harus, seperti bandara, hotel perlu dibangun secara memadai. Pendek kata, diperlukan peta jalan yang detail tentang bagaimana memajukan daerah-daerah kepulauan

di Indonesia ini secara memadai.

Penutup

Dua periode Jokowi bisa menjadi landasan untuk melompat. Masalahnya, siapa yang akan melanjutkan visi Indonesia Sentris ini ke depan? Lembaga survei musti mulai mengidentifikasi, siapa tokoh-tokoh yang menonjol dan layak menjadi pemimpin masa depan. Jangan sampai Indonesia dipimpin oleh siapapun dia, namun tak punya visi Indonesia Sentris dan tak berintegritas. Apalagi suka bermain dengan isu primordial demi kekuasaan. Pemimpin jenis ini harus dieliminasi.

Edukasi politik diperlukan sejak dari sekarang dengan menegaskan visi besar, cita-cita serta arah bangsa ini ke depan. Dari situ segala upaya memecah belah bangsa bisa direduksi secara proporsial. Jangan sampai, periode pasca 2024 Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang visi ke-Indonesia-annya tak utuh, hanya mengambil sebagian saja. Bagaimana pun isu fragmentasi dan fundamentalisme sangat subur di Indonesia.

Konflik di Ambon bisa menjadi pelajaran, agar jangan pernah lagi terjadi di bumi Indonesia ini. Fakta kelam itu perlu menjadi referensi sejarah bagi siapapun yang menginginkan Indonesia ini menjadi negara besar di masa depan.

Depok, 16 Juni 2019



Mus J. Huliselan lahir di Saparua, 16 September 1943. Ia

menempuh pendidikan S1 di Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Manado pada tahun 1971, dengan mengambil ilmu studi sejarah. Selanjutnya, pendidikan S2 di *Ecole des Hautes Etudes En Sciences asociale* (SHESS), Paris, Prancis jurusan

Antropologi pada tahun diselesaikannya pada 1980.

Empat tahun sesudahnya yaitu 1984, melanjutkan S3 pada perguruan tinggi yang sama.

Pada 1994-2003 Mus J. Huliselan menjabat Rektor Universitas Pattimura (Unpatti) di Ambon, Maluku. Kemudian, selama tiga tahun dari 1997 – 2001 ia memangku posisi sebagai Ketua Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Indonesia Bagian Timur, dan pada tahun 2008 – 2015 menjabat sebagai Anggota Dewan Pembina Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri Kawasan Timur Indonesia. Saat ini, Mus merupakan Ketua Dewan Pembina Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku.

Maluku Menyongsong Ke Timur Haluan Menuju

Mus J. Huliselan

Maluku dalam Perdagangan Dunia

Pendahuluan

Maluku sebagai provinsi kepulauan memiliki keberagaman etnis, budaya, bahasa dan agama yang sangat tinggi termasuk perbedaan karakter biologis. Sebagaimana pada bahagian pengantar Buku ke Timur haluan Menuju “di timur matahari” bahwa Maluku sebagai penghasil rempah rempah, cengkih, pala dan fuli, merupakan satu wilayah yang menjadi incaran pedagang dunia. Sejarah rempah rempah telah ada sejak ribuan tahun lalu, mulai dari segenggam cengkih yang ditemukan dalam sebuah wadah kramik yg terbakar di gurun pasir Suriah yg dulunya merupakan sebuah kota kecil di tepi Sungai Efrat dan diperkirakan usia cengkih tersebut telah ada sejak

tahun 1721 SM (Turner Jack 2011: xix). Bagaimana hal ini bisa terjadi, yaitu cengkih dapat berpindah tempat dari Maluku ke gurun pasir kering di Suriah? tidak seorangpun mengetahuinya.

Maluku dan Rempah rempah

Sesuatu hal yang merupakan kepastian adalah beberapa ratus tahun Sebelum Masehi sampai dengan abad pertengahan, aroma rempah-rempah hanya dimiliki oleh para raja, bangsawan dan orang kaya, mulai dari firau di Mesir, para Sultan, Raja dan Kaisar di Cina, India, Arab, Persia dan Eropa. Aroma rempah rempah bukan saja menjadi hak dan milik manusia yang masih **hidup** tetapi juga bagi mereka yang sudah **meninggal**.

Cengkih pada awalnya merupakan tanaman pada 4 pulau kecil di Maluku Utara yaitu Ternate, Tidore, Bacan, dan Makian sedangkan pala adalah tanaman dari Pulau Banda yang kemudian mulai ditanam di Lei Hitu, Lease dan di Pulau Seram pada abad XV dan di Lei Timor (Kota Ambon) pada abad XVII.

Rempah rempah Tanaman Incaran Dunia

Keberadaan Rempah-rempah (cengkih, pala dan fuli) telah mempertemukan Maluku dengan berbagai bangsa dan berbagai agama yaitu:

A. Perjumpaan dengan Agama Hindu.

Pengaruh Agama Hindu-Budha di Maluku dapat dilihat dalam buku Negarakartagama yang menyebut tempat tempat seperti: Ambwan utk menyebut Ambon , Ceran untuk Seram dan Gurun untuk Gorom. Karenanya tidak mengherankan apabila telah terbina hubungan perdagangan dan komunikasi antara Maluku dgn kota kota dagang di Sumatera (Sriwijaya 682 M – 1025 M) dan Jawa

(Majapahit 1293 – 1478/1522 M).

B. Perjumpaan dengan Agama Islam. Pada akhir abad XIV terjadi perjumpaan dgn bangsa bangsa Arab, Persia, Turki, India dan Cina sekaligus merupakan perjumpaan dgn Agama Islam. Dalam perjumpaan ini, Agama Islam mulai di anut oleh sebagian masyarakat di Maluku. Pada zaman ini Ternate, Tidore, Banda, Hitu dan Seram timur (Gorom dan Geser) telah menjadi pusat pusat perdagangan rempah rempah. Ternate dan Tidore meluaskan pengaruhnya sampai ke Halmahera, Papua Barat dan Seram.

Banda memiliki hubungan dagang dengan Ternate, Seram Timur, Seram, Ambon, Nusa Tenggara Timur (NTT), Tuban, Gersik, Palembang, Kutai, Makassar dan Buton (Gambar 1.).

Seram Timur (Geser dan Gorom) di samping memiliki hubungan dagang **Sosolot** dengan Papua Barat (Onin, Raja empat Fak-Fak dll), juga dengan Banda, Kei dan aru (Gambar 2.). Masyarakat Seram Timur di samping bersekutu dengan pedagang Papua juga dengan Halmahera Utara dalam perdagangan budak. Selain itu, di Seram Timur diketemukan jejak budaya *Dongson Drum* yang diduga dibawa oleh pedagang pedagang Cina melalui rute mulai dari Semenanjung Melayu – Sumatra – Jawa – Bali – NTT – Maluku Tenggara (Leti, Luang, Tanimbar, Kei) – Gorom (Gambar 3).

Di Kei, *Dongson Drum (Nekara)* dapat dijumpai di desa Matwear (bagian penutup yang disebut Ngutun-Rit) dan di desa Fan (bagian badan yang disebut Tananbes). Rute penyebaran *Nekara* seperti tersebut diatas merupakan pertanda adanya hubungan dagang antara Nusantara (Indonesia termasuk Seram Timur) dengan Asia daratan yg diperkirakan mulai pada thn 1000 SM – 1 SM. *Nekara*



Gambar 1. Jaringan Perdagangan Pala Banda Pada Era Prakolonial



Gambar 2. Jaringan Perdagangan Sosolot Pada Era Prakolonial



Gambar 3. Rute Penyebaran Dongso Drum (Nekara)

C. Perjumpaan dengan Bangsa Portugis abad ke XVI. Bangsa Portugis datang bukan saja untuk berdagang tetapi juga untuk menguasai wilayah rempah rempah dan menyebarkan Agama Kristen Katolik.

D. Perjumpaan dengan Bangsa Belanda abad XVII.

Sama dengan Bangsa Portugis, Bangsa Belandapun bertekad menegakkan monopoli rempah rempah di Maluku dan memperkenalkan Agama Kristen Protestan

E. Perjumpaan dgn Bangsa Inggris abad XVII (Banda). Persaingan antara Bangsa Belanda dan Inggris untuk menguasai Banda, akhirnya dimenangkan oleh Bangsa Belanda (Jan Pieterzoon Coen) pada tahun 1621. Persaingan Bangsa Belanda – Inggris di Banda berakhir

dengan ditukarnya Pulau Run milik Inggris dengan Pulau New Amsterdam (sekarang Manhattan) melalui perjanjian Breda pada tahun. 1667.



Gambar 4. Salah Satu jenis Dongso Drum (Nekara)

Untuk dapat menguasai rakyat Maluku secara penuh, maka bangsa Belanda, menghancurkan struktur dan sistem pemerintahan adat serta masyarakat di campur aduk. Masyarakat Banda terusir meninggalkan negeri asalnya dan menyebar ke Kei, Seram Timur dll. Selama 200 tahun lebih masyarakat Maluku berada dalam zaman kegelapan. Maluku sebagai satu teritori secara fisik, sosial dan budaya kehilangan identitasnya. Terjadi disharmoni sosial dan disintegrasi antara sesama orang Maluku.

Permusuhan antar sesama telah mendorong para pemimpin adat di Seram, Lease dan Ambon, untuk

mengenal kembali jati diri mereka melalui rekonstruksi sistem nilai budayanya.

Zaman Pencerahan

Pengenalan kembali akan jati diri ini, telah melahirkan reintegrasi sosial yang dibangun diatas fondasi nilai persaudaraan, lintas agama, budaya dan bahasa biarpun berbeda melalui cara:

1. Mencari kembali kerabat mereka yang telah terpisah karena perbedaan agama, yang dipisahkan oleh Belanda, dan karena peperangan untuk kembali saling menjalin hubungan persaudaraan
2. Ikatan persaudaraan ini dikenal dengan nama: Gandong, Bongso, Adi-kaka dan Pela.

Maluku yang Terabaikan

Walaupun rempah rempah Maluku telah memberikan keuntungan besar bagi Belanda dan memakmurkan Kerajaannya, tetapi Belanda tidak menjadikan Maluku sebagai pusat pemerintahannya. Belanda membangun Batavia (karena strategis) sebagai pusat pemerintahan dengan demikian pembangunan lebih diutamakan di Pulau Jawa. Tanaman surgawi ini kemudian mulai kehilangan hasiat aromanya ketika pada tahun. 1770, Pierre Poivre (Bangsa Perancis) berhasil mencuri 400 anakan pala dan 70 anakan cengkih serta ribuan biji pala dan cengkih dari Pulau Gebe dan Patani (Maluku Utara). Tanaman curian ini kemudian ditanam di Zanzibar, Madagaskar dan Martinique dengan membuah hasil yang banyak dan dianggap lebih unggul dari produksi di Maluku. Dengan demikian secara perlahan tapi pasti, cengkih dan pala Maluku tersingkirkan dan tidak lagi diburu karena telah menjadi tanaman dunia.

Maluku dari wilayah yang dicari menjadi wilayah yang ditinggalkan dan kondisi ini berlangsung sampai terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbagai program pemerintah terutama pada zaman pemerintahan Orde Baru yang terkenal dengan program pembangunan lima tahun (Pelita) dengan menggunakan teori pertumbuhan dan pembangunan Rostow sampai dengan penerapan berbagai pendekatan pembangunan pada Orde Reformasi seperti: teori penciptaan tenaga kerja, teori pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan sumber daya manusia, pengutamaan pembangunan pertanian sampai dengan pembangunan desa terpadu dan padat karya, Maluku tetap terabaikan. Kondisi ini terjadi karena orientasi perencanaan pembangunan nasional menggunakan pendekatan kontinental dan lebih difokuskan untuk pemecahan masalah di Pulau Jawa bukan untuk Indonesia Timur, apalagi untuk wilayah kepulauan seperti Maluku.

Perubahan orientasi pembangunan ke arah timur mulai jelas terlihat dalam kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 pada bab III bagian E, tentang koridor ekonomi Maluku Papua. Tujuan program ini adalah membangun pusat pusat ekonomi di Maluku Utara, Maluku dan Papua yang terintegrasi dalam satu koridor dan didukung oleh jalur pelayaran domestik termasuk Tol Laut. Program ini merupakan penanda adanya perhatian dan keseriusan pemerintah terhadap pembangunan wilayah Indonesia Timur termasuk di Maluku. Masyarakat Maluku siap menyongsong “Ke Timur Haluan Menuju” dengan berbagai rencana dan programnya melalui pendekatan pembangunan Indonesia Sentris.

Tanggapan Terhadap Buku “ Ke Timur Haluan Menuju”

Terbitnya buku *Ke Timur Haluan Menuju* perlu diberi apresiasi yang tinggi karena selama ini Kawasan Timur Indonesia di abaikan atau lebih tepat di lupakan dalam perencanaan pembangunan nasional. Masalah pokoknya adalah adanya kesenjangan pembangunan antar Jawa dan luar Jawa yang telah menciptakan ketimpangan ekonomi antar Wilayah Barat dan Timur Indonesia seperti apa yg dikemukakan dalam bagian pengantar buku ini. Penulisan buku ini merupakan awal untuk menemukan jawaban apakah model pendekatan pembangunan Indonesia Sentris sudah tepat untuk diterapkan sebagai satu konsep pembangunan?

Selama ini, terutama pada periode Orde Baru dan Reformasi, pendekatan pembangunan lebih mementingkan pendekatan kontinental dari pada pendekatan kepulauan. Dengan demikian pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan jalan raya lebih diutamakan dari pembangunan perhubungan laut yang saat ini dikenal dengan Tol Laut. Pembangunan Tol Laut dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla merupakan salah satu program unggulan dalam memberdayakan Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Kepulauan.

Oleh karena itu menurut pendapat saya buku ini merupakan upaya awal menghilangkan ketimpangan pembangunan antara kawasan timur dan barat Indonesia yang harus dilanjutkan dengan studi yang lebih luas dan mendalam. Buku *Ke Timur Haluan Menuju* merupakan satu hasil studi pendahuluan yang menurut pendapat saya sudah baik, dilihat dari permasalahan yang dibahas dan hasil analisisnya sehingga memperoleh hasil yang akurat, mendalam dan terpercaya. Apalagi kajian ini dihasilkan dari satu penelitian lapangan yang menggunakan metode

kualitatif. walaupun belum dapat menarik satu generalisasi tentang permasalahan yang diteliti (Maluku secara keseluruhan).

Perlu dipertanyakan adalah mengapa wilayah Pulau Geser, Kep. Banda, Rumah Tiga, Kota Ambon dan Halmahera Utara yang dipilih sebagai lokasi penelitian.

Harapan Maluku di Masa Depan

- Apa yang diharapkan oleh Maluku di masa depan?:
- Satu perubahan yang dapat menyetarakan Maluku dengan daerah lainnya di Indonesia. Hal ini sesuai seperti apa yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo yaitu masa depan Indonesia adalah di Timur.
- Maluku sebagai wilayah kepulauan dengan 1342 pulau dan memiliki 24 blok migas dan kekayaan laut yang berlimpah menanti kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintah di bidang:
 1. Transportasi laut dan antar pulau
 2. Peningkatan kualitas sumberdaya manusianya
 3. Pengembangan Pendidikan yang merata dan bermutu
 4. Pengembangan ekonomi kepulauan melalui pendekatan gugus pulau dan laut pulau
 5. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi



Jl. Letjen S. Parman Kav. 5-6
Kompleks Mandiri Blok O No. 12,
Slipi, Jakarta Barat
Telp. 62-21-22123150;
E-mail: info@populicenter.org
Website: <http://www.opulicenter.org>

